

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

Oleh

DEDI SAPUTRA

Pemberlakuan Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik menyebabkan adanya konversi Kartu Pegawai menuju Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik. Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik merupakan wujud *Elektronik Government* dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian berlokasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja implementor dalam melaksanakan Kebijakan. Penelitian ini masuk dalam jenis *Project Monitoring Evaluation Research*, yaitu riset yang mengevaluasi proses implementasi suatu kebijakan (*on-going evaluation*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. selain itu, untuk menjamin kredibilitas data dilakukan juga observasi dan studi dokumentasi.

Kesimpulannya, Implementasi Kartu Pegawai Elektronik diLingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan hasil yang tidak optimal, ini didasarkan atas tidak tercapainya fungsi utama dari Kartu Pegawai Elektronik. Namun demikian, secara administratif telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Untuk memperbaiki output program Implementasi KPE dimasa mendatang, yang perlu dilakukan : *pertama*, Membangun komunikasi dengan Bank Pemerintah Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal implementasi layanan perbankan; *kedua*, Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memfungsikan KPE; *ketiga*, Memaksimalkan proses sosialisasi dengan memanfaatkan fasilitas Internet dan menyediakan Pamflet & Leaflet tentang Kartu Pegawai Elektronik diBadan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : evaluasi , implementasi kebijakan, kartu pegawai elektronik (KPE).